

## LAPORAN NOTULA

### *OGP Secretariats: Indonesia-Nigeria-Philippines Exchange*

Rabu, 9 Februari 2022 – Pukul: 15.30-16.45 WIB

## PENDAHULUAN

OGP Nigeria menjadwalkan pertemuan virtual dengan Open Government Indonesia (OGI) dan OGP Filipina (PH-OGP) untuk belajar dari bentuk Sekretariat OGI dan PH-OGP. Pertemuan ini difasilitasi oleh OGP Support Unit untuk kawasan Afrika dan Asia Pasifik. Pertemuan virtual ini terdiri dari sesi presentasi singkat dan sesi tanya jawab untuk membantu OGP Nigeria memahami apa saja yang perlu disiapkan untuk mengembangkan Sekretariat OGP di Nigeria.

## TUJUAN

1. Memberikan pemaparan tentang cara kerja Sekretariat Open Government Indonesia;
2. Bertukar informasi dengan Sekretariat OGP Nigeria dan Philippines.

## PEMBAHASAN

1. **Claire Bautista** dari selaku POC PH-OGP memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Tidak ada peraturan khusus yang mendirikan PH-OGP, namun ada beberapa peraturan yang menjadi dasar keberadaan PH-OGP. Contohnya, Konstitusi Filipina menekankan pentingnya promosi dan perlindungan hak rakyat dan OMS, serta pentingnya platform-platform untuk “partisipasi efektif dan berarti pada pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi pada semua level.” OGP juga disebutkan dalam dokumen *Philippine Development Plan* (PDP).
- Sekretariat PH-OGP dipimpin oleh Komite Pengarah (MSF) yang memberikan keanggotaan setara antar sektor pemerintah dan non-pemerintah. Sekretariat PH-OGP terdiri dari Pihak Pemerintah (*Government Secretariat/Lead Secretariat*) dan Pihak Non-Pemerintah (*Non-Government Secretariat*). Pemilihan organisasi yang ditetapkan sebagai *Non-Government Secretariat* dipilih oleh *Non-Government Steering Committee*. Kedua Sekretariat ini berkolaborasi dengan dekat untuk berfungsi sebagai satu kesatuan.
- Sekretariat PH-OGP memberikan arahan secara umum untuk Sekretariat. Sekretariat Pemerintah memberikan layanan teknis dan dukungan untuk Komite Pengarah Pemerintahan dan Komite Pengarah secara keseluruhan. Sekretariat Non-Pemerintah memberikan layanan teknis dan dukungan untuk Komite Pengarah Non-Pemerintah dan Komite Pengarah secara keseluruhan. Sementara itu, narahubung atau *Point of Contact* dari Filipina menjalankan fungsi sesuai dengan *OGP Handbook*.
- *Resource Management* dibagi menjadi dua: 1) *personnel cost* dan 2) *activities, publications, travels*.
- Tantangan yang dihadapi PH-OGP antara lain kurangnya dasar hukum untuk mandat PH-OGP, meneruskan partisipasi OMS dalam proses OGP, kurangnya dukungan pendanaan khusus untuk kegiatan OGP, mendapat koordinasi dan persetujuan dari pihak Pemerintah yang diperlukan untuk implementasi rencana

aksi, dan limitasi akibat pandemi. Kesuksesan PH-OGP antara lain adanya kerja sama proaktif antara anggota Komite Pengarah, relasi kerja sama baik antara Sekretariat-Sekretariat dan *OGP Support Unit*, membangun minat mengenai OGP di sektor akademik, lokal, dan sektor lain, dan lain-lain.

2. **Maharani Wibowo** dari selaku POC dari Open Government Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Indonesia adalah salah satu negara yang memelopori inisiatif Open Government beserta 7 negara lain. OGI sendiri adalah inisiatif dari Pemerintah Indonesia yang dimulai di 2012 untuk berpartisipasi dalam OGP. Melalui OGI, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan OMS untuk membuat ide, inisiatif, dan praktek pemerintah terbuka untuk mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
- OGI memiliki 5 nilai. OGP memiliki 4 nilai (Akuntabilitas, Transparansi, Inovasi, Partisipasi), namun OGI sendiri menambah 1 nilai tambahan, yaitu inklusivitas.
- Indonesia telah membuat VI RAN. Untuk RAN VI, ada 5 area komitmen: *Open Contracting, Data Governance, Civic Space, Community Empowerment and Inclusion, Social Accountability*, dan *Access to Justice*.
- Dasar hukum OGI yakni Keppres Nomor 13 Tahun 2014 yang menyatakan keanggotaan Indonesia dalam OGP.
- Anggota Steering Committee OGP saat ini tidak *equitable*, pada periode berikut akan diupayakan agar ada jumlah kursi yang lebih setara untuk pemerintah dan OMS. Deputi OGI Indonesia adalah Bappenas. Tim implementasi terdiri dari pemerintah dan OMS. OGI berfungsi sebagai tim pendukung bagi kegiatan Sekretariat.
- Fungsi dan tanggung jawab Sekretariat OGI adalah pembuatan RAN, pembuatan GSAR untuk OGP, membimbing penyusunan Rencana Aksi Daerah dan membimbing implementasi dari OGP Local, serta menjalankan tanggung jawab Sekretariat.
- Adapun pembelajaran yang diambil dari implementasi Sekretariat Nasional OGI adalah: 1) Perlunya penguatan dasar hukum untuk mengatur tata kelola Sekretariat dan memperkuat implementasi RAN, 2) Mekanisme monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan secara berkala agar pencapaian tiap komitmen dalam RAN dapat terpantau, 3) Susunan Dewan Pengarah yang optimal adalah dalam bentuk kesetaraan dalam perwakilan elemen pemerintah dan nonpemerintah, dan 4) Media sosial dan diseminasi digital merupakan upaya yang efektif dalam meraih atensi dan kesadaran publik terhadap upaya keterbukaan pemerintah.

3. **Maureen Kariuki** selaku *Senior Regional Coordinator, Africa and the Middle East* dari OGP mengajukan pertanyaan berikut:

- Bagaimana *resourcing* dilakukan di Sekretariat OGI?
- Dukungan teknis dan administratif apa saja yang disediakan Sekretariat Pemerintah dan Sekretariat Non-Pemerintah PH-OGP?

4. **Dr. G. Ahmed NC** dari OGP Nigeria mengajukan pertanyaan berikut:

- Apakah ada keuntungan dalam membagi Sekretariat menjadi dua: Sekretariat Pemerintah dan Sekretariat Non-Pemerintah? (kepada PH-OGP)
- Apakah OMS membuat kegiatan mereka secara sukarela?

5. **Claire Bautista** dari PH-OGP menjawab pertanyaan Ibu Maureen Kariuki:

- Sekretariat Pemerintah memberikan dukungan teknis kepada anggota OGP untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, seperti seminar. Funding berasal dari kantor sendiri. *Collaterals to mainstream OGP to our partners.*
- Sekretariat NGO memberikan dukungan kepada Komite Pengarah OMS. Dukungan administratif dilakukan secara kuartal. Sekretariat NGO memastikan partisipasi dari sektor OMS dan meneruskan informasi ke OMS.

6. **Maharani Wibowo** dari OGI menjawab pertanyaan Ibu Maureen Kariuki:

- Semua pendanaan datang dari pemerintah (BAPPENAS). Pemerintahan mengalokasikan dana tahunan untuk Sekretariat yang mendanai rapat, pembuatan dokumen, dll. Tapi ketika pendanaannya tidak cukup, bisa berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden. Pendanaan saat ini bukan isu utama karena saat ini rapat bisa dilakukan virtual.

7. **Jen De Belen** dari PH OGP menjawab pertanyaan dari Dr. G. Ahmed NC:

- Sebelum Sekretariat dibagi menjadi 2, partisipasi dari OMS minim. Keuntungan dari membagi Sekretariat menjadi dua adalah bahwa ada unit spesifik yang menjadikan partisipasi OMS dalam OGP sebuah prioritas. Pembagian informasi juga menjadi lebih mudah karena Pemerintah bisa sharing dengan badan Pemerintahan lainnya, dan yang Non-Pemerintah bisa berbagi dengan OMS.
- Acara OMS memang dibuat secara sukarela. Tapi untuk kegiatan tertentu seperti konsultasi, ada mitra yang memberikan dukungan tertentu (seperti dukungan transportasi). Fokus penggunaan dana, khususnya untuk Sekretariat NGO, adalah untuk memastikan ada tenaga kerja yang cukup.

8. **Robin Gumasing** dari PH OGP menambahkan pemaparan berikut tentang bagaimana Sekretariat Pemerintah dan Non-Pemerintah bekerja sama:

- Elemen nonpemerintah biasanya berkoordinasi dengan elemen pemerintah guna menyesuaikan program-program yang dapat dilaksanakan bersama. Saat Pemerintah menyiapkan berkas mereka sendiri, Sekretariat Non-Pemerintah melakukan yang sama dan menjadwalkan konsultasi dengan Pemerintah di waktu yang tepat.

9. **Uchenna Arisukwu** dari OGP Nigeria memaparkan dan mengajukan pertanyaan berikut:

Nigeria ingin mendapatkan *Executive Order* sebagai dasar hukum dari OGP Nigeria. Bagaimana kedudukan hukum dari OGP Filipina dan Indonesia?

10. **Yudhi Ramlan** dari OGI menjawab pertanyaan Bapak Uchenna Arisukwu:

Keputusan Presiden yang terdapat sebenarnya untuk mengatur keanggotaan Indonesia dalam OGP. Saat ini sedang dalam proses penguatan dasar hukum dengan

pembuatan Keputusan Menteri untuk mengatur tata kelola Sekretariat OGI. Ini penting untuk meningkatkan manajemen sekretariat dan memiliki mandat lebih kuat bagi K/L dan OMS untuk mengimplementasi Rencana Aksi.

**11. Maharani Wibowo** dari OGI menambahkan:

Di Indonesia, ada banyak jumlah CSO. Namun, CSO yang tertarik mengikuti Open Government tidak banyak. Itu makanya sulit di Indonesia jika Pemerintah dan OMS memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga Pemerintah lebih banyak mengambil tanggung jawab dibandingkan OMS. Untuk NAP berikutnya, OGI akan melibatkan Mitra Pengembangan/*Developing Partners*. Belum ada daftar nama mitra-mitra tersebut, tapi OGI sedang mengupayakan sebuah *Multi-Donor Coordination Meeting* dan proposalnya beserta nama potensialnya sudah disiapkan.

**12. Ivy Ong** dari OGP Support Unit Asia Pacific bertanya:

Di RAN yang baru, apa yang menjadi ekspektasi untuk para anggota OMS?

**13. Maharani Wibowo** dari OGI menambahkan:

Untuk RAN I-V, semua komitmen dilakukan oleh pihak Pemerintah. Untuk RAN VI, ada 18 komitmen yang diupayakan bersama OMS dan Pemerintah. Yang diharapkan dari OMS adalah berkoordinasi lebih baik dengan mitra OMS lainnya untuk monitor dan evaluasi target pencapaian yang terdapat dalam RAN. OGI juga berencana mengadakan rapat setiap Kamis untuk berkoordinasi tentang pencapaian RAN (tapi hal ini belum terlaksana karena kesibukan lainnya).

**14. Maureen Kariuki** dari OGP bertanya:

Apa yang dilakukan Sekretariat PH-OGP pada saat transisi pemerintahan?

**15. Claire Bautista** dari PH-OGP menjawab pertanyaan dari Bapak Uchenna Arisukwu dan Ibu Maureen Kariuki:

- Filipina tidak memiliki peraturan khusus mengenai PH-OGP, hanya hukum-hukum pendukung (seperti Konstitusi). PH-OGP ingin memiliki sebuah keputusan eksekutif sebagai dasar hukumnya, namun keputusan eksekutif tersebut dapat berubah dan berbentrok bila ada perubahan Pemerintah.
- Sebelum administrasi saat ini, Sekretariat saat di tengah mengimplementasi sebuah RAN. Ada dokumen transisi mengenai PH-OGP yang diberikan kepada pemerintahan baru yang terlibat dalam RAN. PH-OGP juga memaparkan tentang kegiatan regional dan internasional yang mereka terlibat dalam agar kerjaan PH-OGP dapat diapresiasi.

**16. Abayomi Akinbo** dari OGP Nigeria menjelaskan dan bertanya:

- Nigeria ingin mendapatkan keputusan eksekutif untuk memvalidasi keberadaan dan pekerjaan OGP. Di Nigeria, keadaan mengenai siapa yang memegang peran aktif terbalik dengan Indonesia: di Indonesia, pemerintah memainkan peran yang lebih untuk inisiatif *open government*. Di Nigeria justru OMS yang mendorong pemerintah untuk melakukan hal tersebut, dan

kapasitas untuk ini terbatas. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana pengalaman OGI dan PH-OGP mengatasi masalah birokrasi dan administrasi publik dalam mendapatkan pendanaan?

- Bagaimana cara memastikan sebuah kemitraan yang tetap seimbang antara pemerintah dan OMS?
- Di Indonesia, bagaimana pemerintahan memberikan *knowledge transfer* bagi level OMS?

**17. Maharani Wibowo** dari OGI menjawab pertanyaan Bapak Abayomi Akinbo:

- Di Indonesia, cara menjaga keseimbangan peran pemerintah dan OMS, serta mengatasi persoalan birokrasi, adalah melalui platform seperti platform *open government*, anti-korupsi, HAM, dan lain-lain. Yang membuat OGI sukses adalah: 1) platform OGP di bawah BAPPENAS, karena BAPPENAS adalah badan yang melakukan perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan negara; 2) ada koordinasi antar mitra pengembangan serta OMS di bawah BAPPENAS.
- Untuk birokrasi dan administrasi, terkadang nilai OGP memang berbeda dengan nilai-nilai lain. OGI coba mengatasi isu tersebut dengan membuat sisi pemerintahan memahami pentingnya pemerintah yang terbuka dan keterbukaan data. Kita memiliki platform-platform khusus untuk ini, termasuk platform di mana OMS dan rakyat bisa memberikan masukan.
- Untuk *knowledge transfer*, OGI memiliki sebuah repositori online yang bisa diakses secara publik. Di Pemerintah sendiri, memang menjadi tantangan jika PIC satu komitmen diubah.

**18. Robin Gumasing** dari PH-OGP menjawab pertanyaan Bapak Abayomi Akinbo:

- Untuk *knowledge transfer* dan manajemen, memang harus ada peran seimbang antara pemerintah dan OMS untuk komposisi anggota komite pengarah. *Knowledge transfer* bukan hanya dilakukan komite pengarah, tetapi juga aktor lainnya (cth: pegawai pemerintah, staf sekretariat) yang dapat membantu membagikan nilai-nilai OGP.
- Untuk perihal keseimbangan peran, Sekretariat PH-OGP mendengarkan kedua pihak yang terlibat.
- Untuk penganggaran, biaya yang dikeluarkan PH-OGP diakui Pemerintah dalam sebuah *National Procurement Plan* dan juga ada dukungan dari mitra pengembangan.

**19. Claire Bautista** dari PH-OGP menambahkan:

- Terkadang PH-OGP bermitra dengan lembaga pemerintahan yang merupakan anggota dari Komite Pengarah atau merupakan pemegang komitmen, karena mereka memiliki kegiatan yang mendukung kegiatan OGP tertera di budget mereka. Jadi, jika Sekretariat Pemerintah dalam PH-OGP tidak bisa menyediakan pendanaan untuk kegiatan tertentu, lembaga Pemerintahan lainnya melakukan itu, terutama untuk kegiatan konsultasi.

- Untuk sisi pengadaan, PH-OGP menjadwalkan pengadaan kegiatan karena didanai sebelum implementasi kegiatan.

**20. Ivy Ong** dari OGP menambahkan:

Platform PH-OGP telah mencapai tahap pengembangan yang cukup matang, sehingga OGP sudah melegitimasi inovasi agar lembaga-lembaga pemerintahan bisa melampaui apa yang di mandat mereka untuk mencapai pemerintahan partisipatif dan berinovasi melalui platform tersebut.

Sekretariat PH-OGP juga menjadi sebuah “jembatan” antar lembaga pemerintah berbeda untuk berdiskusi tentang *open governance*.

## **KESIMPULAN**

Secara umum, informasi yang ditanyakan OGP Nigeria berkisar tentang dasar hukum Sekretariat OGI dan PH-OGP, cara memastikan keseimbangan peran antar pihak pemerintah dan OMS, penganggaran Sekretariat, dan cara menghadapi transisi dalam pemerintahan. Ini karena di Nigeria, akan ada transisi pemerintah dalam waktu yang singkat, dan OGP Nigeria ingin mendapatkan sebuah keputusan eksekutif dari pemerintahan sebagai dasar hukum keberadaannya. Selain itu, OGP Nigeria banyak bertanya mengenai peran OMS dalam Sekretariat dan cara menyeimbangkan perannya dengan pihak pemerintah, karena di Nigeria saat ini OMS memainkan peran lebih aktif dibandingkan pemerintah dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang terbuka. Pada akhir sesi presentasi dan tanya jawab, perwakilan OGP Nigeria menyatakan mereka sudah mendapatkan informasi dan gambaran yang mereka butuhkan guna penguatan sekretariat OGP di Nigeria.

## DOKUMENTASI

PowerPoint Slide Show - (2022.02.09 OGP Nigeria Peer Learning\_v2) - PowerPoint

# Legal Bases

| Legal Basis                       | Particulars  |
|-----------------------------------|--|
| The Philippine Constitution       | Articles II, X, and XIII of the 1987 Constitution put emphasis on the promotion and protection of the rights of the people and civil society organizations and platforms for "effective and reasonable participation at all levels of social, political and economic decision-making."   |
| Executive Order No. 24, s. 2017   | Creation of the Participatory Governance Cluster of the Cabinet (where PH-OGP is recognized as one of the consultation platforms in citizen engagement)  |
| Philippine Development Plan (PDP) | Under its pillar of <i>Malasakit</i> , the country's continued engagement with Open Government Partnership (OGP) is identified in the Philippine Development Plan (PDP) 2017-2022's chapter on <i>Ensuring People-Centered, Clean and Efficient Governance</i> as a key strategy to ensure that government policies, programs, and projects are responsive to the needs of the people - which can ultimately lead to restoring the people's trust in the government. |

2 THE PHILIPPINE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (PH-OGP)

Slide 2 of 12

PowerPoint Slide Show - (2022.02.09 OGP Nigeria Peer Learning\_v2) - PowerPoint

# Structure of the PH-OGP Secretariat

```
graph TD; A[PH-OGP Steering Committee] --> B[Government Secretariat (Lead Secretariat)]; A --> C[Non-Government Secretariat]; B --- D[Department of Budget and Management Logo]; D --- E[Point of Contact for the Philippines]; C --- F[CODE NGO Logo]; F --- G[Chosen by the Non-Government Steering Committee]
```

PH-OGP Steering Committee

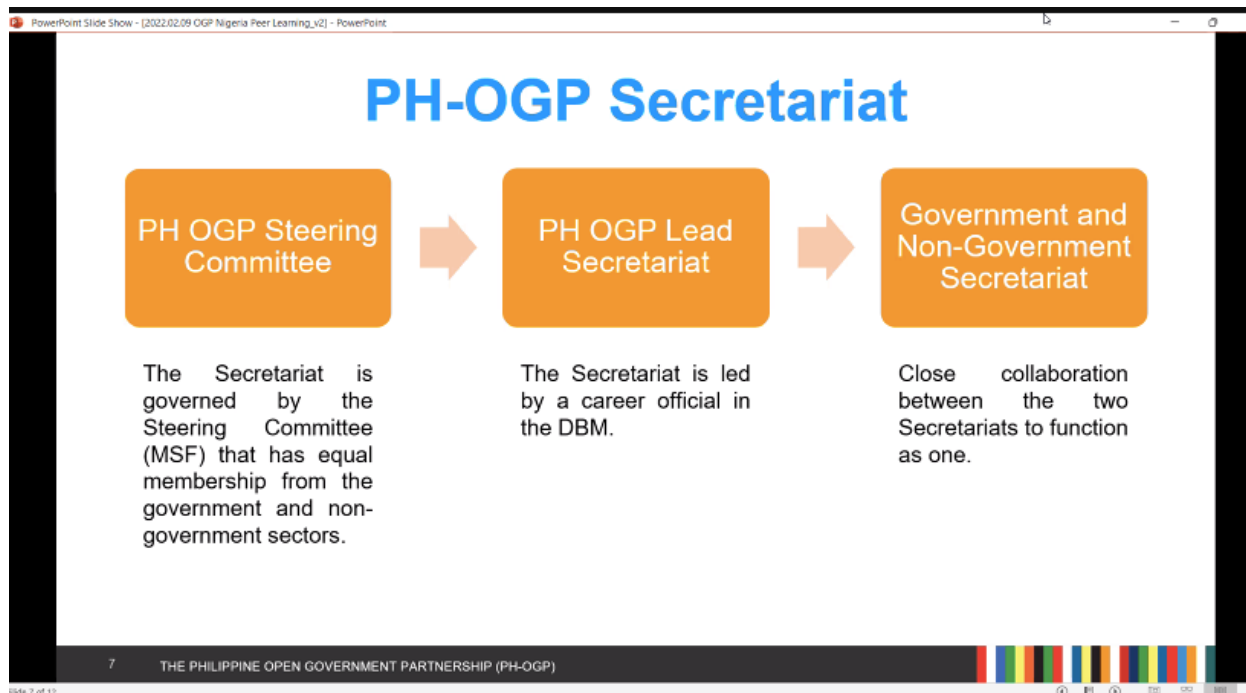
Government Secretariat (Lead Secretariat)

Non-Government Secretariat

Department of Budget and Management  
1936  
Point of Contact for the Philippines

CODE NGO  
Networking. Empowering. Transforming.  
Chosen by the Non-Government Steering Committee

5 THE PHILIPPINE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (PH-OGP)



PowerPoint Slide Show - [2022.02.09 OGP Nigeria Peer Learning\_v2] - PowerPoint

## Roles of PH-OGP Secretariat

| Legal Basis                     | Definition/Remarks   |
|---------------------------------|--|
| Lead Secretariat                | Provides overall guidance/direction to the Secretariat   |
| Government Secretariat          | Provides technical and support services to the Government SteerCom and entire SteerCom   |
| Non-Government Secretariat      | Provides technical and support services to the Non-government SteerCom and entire SteerCom   |
| The Philippine Point of Contact | Consistent with the OGP Handbook, performs these functions: <ul style="list-style-type: none"><li>Engage stakeholders, the OGP Support Unit, and the IRM, among others</li><li>Government Coordination</li><li>Online Repository</li><li>Prepare the End-of-Term Self Assessment Report</li><li>Participate in global OGP events and regional events, and peer exchange activities</li></ul> <a href="https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/02/OGP_Handbook-Rules-and-Guidance_20210211.pdf">https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/02/OGP_Handbook-Rules-and-Guidance_20210211.pdf</a> |

8 THE PHILIPPINE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (PH-OGP)

Slide 8 of 12



## Challenges and/or Successes

| Challenges  | Successes  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustaining non-government participation in the OGP processes</li> <li>Limitation brought by the pandemic</li> <li>Buy-in from government agencies that are key to the successful implementation of the Action Plan</li> <li>Lack of dedicated funding support for OGP activities</li> <li>Lack of legal basis for the mandate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro-active engagement of SteerCom members</li> <li>Good working relationship between the secretariats and with the OGP Support Unit</li> <li>Presence of champions in government and non-government</li> <li>Building interest in OGP from the academe, local government units and other sectors</li> <li>Presence of Non-Government Secretariat to help in facilitating technical and administrative support needed by the Non-Gov SteerCom, also in convergence efforts to sustain non-government engagement</li> <li>The Non-government Secretariat helps in agenda setting of the Action Plan through conduct of consultations (OGP Citizens' Agenda)</li> <li>The Non-Government Secretariat helps in pushing for specific commitments in the Action Plan</li> </ul> |

Recording

